

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Peranan minyak dalam dunia internasional menjadi penting semasa Perang Dunia I ketika bangsa-bangsa yang terlibat dalam perang tersebut menggantungkan energi pada minyak untuk menggerakkan mekanisme industri, militer, teknologi, komunikasi dan transportasi mereka. Namun sampai Perang Dunia II karena negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah mengalami kelangkaan pengetahuan teknis dan secara ekonomis sangat lemah dan kebanyakan berada di bawah kontrol negara-negara kolonial, maka hampir semua kebijakan yang menyangkut eksplorasi, produksi dan pemasaran dipegang oleh perusahaan-perusahaan minyak Eropa dan Amerika, atau oleh pemerintahan-pemerintahan kolonial itu sendiri yang berpusat di berbagai ibukota di dunia Barat.¹

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, bersamaan dengan bangkitnya nasionalisme di kalangan negara-negara berkembang, negara-negara penghasil minyak yang sudah jenuh diperlakukan tidak adil oleh bekas negara-negara penjajahnya mulai berusaha merubah cara-cara eksploitasi minyak sampai pemasarannya yang dianggap merugikan dan terlalu menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing. Seiring dengan hal itu mulailah tumbuh perusahaan-

¹ *Quintin Newman, The Oil Industry in the Middle East*, London, 1958, hal. 10.

perusahaan minyak negara-negara berkembang, diantaranya di Indonesia dan Malaysia. Setiap negara yang memiliki sumber daya alam, khususnya minyak dan gas akan berusaha untuk mandiri dalam mengelola sumber kekayaan alamnya. Pemikiran inilah yang kemudian melatar belakangi berdirinya perusahaan migas nasional Pertamina di Indonesia kemudian Petronas di Malaysia. Dalam hal ini, penulis merasa tertarik terhadap fenomena perusahaan dalam bisnis perminyakan, mengingat betapa pentingnya peran minyak dalam perpolitikan internasional.

Indonesia pada saat ini belum mampu untuk mengurangi ketergantungan yang kuat terhadap para perusahaan asing migas. Terbukti walaupun telah memiliki Pertamina namun pemerintah masih banyak mempercayakan banyak tender kepada pihak asing. Beberapa tender eksplorasi, sebagai contoh yang ada di Cepu diberikan pemerintah Indonesia kepada perusahaan migas asing, yaitu Exxon mobil. Berbeda dengan yang terjadi di Malaysia, sebagai negara tetangga terdekat, ternyata Indonesia telah jauh tertinggal.

Petronas yang merupakan perusahaan migas nasional Malaysia juga tentunya melakukan hal yang sama dengan Pertamina. Perbedaan muncul tatkala Malaysia mampu menekan dominasi MNC migas disaat Petronas mampu menunjukkan persaingan ketat di negaranya dengan perusahaan migas asing di Malaysia. Perjuangan Petronas melawan banyaknya perusahaan multinasional sektor migas di negaranya, antara lain Shell, Esso, BP dan lain-lain hingga saat ini membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Saat ini Petronas berkibar tidak hanya di Malaysia, namun juga di

terjadi di Indonesia melalui Pertamina dan di Malaysia yang di wakikan Petronas merupakan hal yang menarik untuk dianalisa.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara berkembang yang dalam sejarah perminyakan kedua negara sangat dipenuhi oleh campur tangan perusahaan asing (MNC). Maka dalam skripsi ini penulis mencoba untuk memperlihatkan bagaimana sebenarnya reaksi negara-negara sedang berkembang terhadap banyaknya perusahaan multinasional tersebut terhadap negara itu sendiri yang hingga saat ini masih memimpin dalam bisnis perminyakan internasional.

Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan terhadap Pertamina. Hal ini sebagai bentuk respon Indonesia terhadap permasalahan yang terkait dengan perusahaan multinasional tersebut. MNC migas dari kebanyakan negara maju menjadi pemain penting dalam industri migas domestik dan internasional. Reaksi Malaysia yang terus mendukung peran Petronas di dalam negeri dan mendukung ekspansi Petronas ke luar negeri juga sebagai wujud dari respon Malaysia terhadap dominasi perusahaan multinasional. MNC mencoba untuk mengambil keuntungan dari negara-negara sedang berkembang yang umumnya, secara ekonomi masih jauh tertinggal dari negara-negara maju.

B. Tujuan Penelitian

Skripsi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara umum tentang pengaruh dan tekanan yang

berkembang, khususnya MNC sektor migas. Bagaimana MNC migas berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pemerintah terhadap sektor migas negaranya.

2. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara kebijakan pemerintah dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang menguasai hajat hidup masyarakat. Dalam hal ini, yakni bagaimana Malaysia dan Indonesia membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan migas nasional mereka.
3. Sebagai prasyarat untuk meraih gelar sarjana S1 (strata I) pada jurusan Ilmu hubungan Internasional, fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Perusahaan multinasional hingga saat ini terus berkembang pesat di negara-negara berkembang seperti misalnya di Indonesia dan Malaysia. Pada sektor migas, sejak dahulu perusahaan migas dari Eropa dan Amerika terus menguasai eksplorasi, produksi dan pemasaran. Di Indonesia diantaranya Caltex, ConocoPhillips, Total, Petrochina, Chevron, Vico, dan BP banyak menguasai sektor migas Indonesia. Shell (Royal Dutch), BP (British Petroleum) dan Esso juga banyak menjalankan operasinya di Malaysia.

Sejalan dengan pertumbuhan nasionalisme di kalangan negara-negara berkembang, banyak terjadi perubahan dalam sektor migas internasional. Dimana

bersaing dalam kegiatan bisnis migas yang mengglobal, diantaranya adalah Indonesia dan Malaysia. Sejarah pencarian minyak di Indonesia memang tidak terlepas dari campur tangan beberapa perusahaan multinasional migas dari negara-negara maju. Kegiatan pencarian migas di bumi Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1871, hanya dua belas tahun setelah minyak dunia pertama dibor di Pennsylvania, AS. Produksi komersil pertama dimulai pada tahun 1885 dan pada ujung abad tersebut minyak bumi sudah diproduksi di kilang-kilang Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan di Kalimantan. Standard Oil of New Jersey masuk ke Indonesia pada tahun 1912 dan kemudian menggabungkan kepentingan mereka di Timur Jauh dengan Mobil Oil untuk membentuk Stanvac. Pada tahun 1936 terjadi penggabungan saham Asia dengan Texaco untuk membentuk Caltex. Jadi terdapat lima maskapai minyak internasional di Indonesia pada tahun 1940-an.²

Sejarah perminyakan di Malaysia juga tidak terlepas dari andil para perusahaan migas asing yang telah beroperasi di Malaysia selama puluhan tahun diantaranya BP, Esso dan lain-lainnya.³ Sebelum tahun 1974, kegiatan pengolahan minyak di Malaysia dijalankan oleh perusahaan minyak multinasional meneruskan sistem konsesi untuk mengeksplorasi minyak di perairan Sarawak, Sabah, dan Terengganu. Kontraktor asing tersebut diantaranya adalah Shell dan Esso. Shell

² <http://www.Pertamina.com>

³ <http://www.Gates.com> Edisi 20, nomor 27 Maret 2006

merupakan perusahaan minyak asal Belanda. Kilang minyak Shell di Port Dickson dibuka pada tahun 1962, ketika itu minyak dibeli dari luar negeri.⁴

Kiprah para perusahaan migas asing dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia telah berlangsung selama puluhan tahun. Hingga saat ini keberadaan para kontraktor asing semakin memberi tekanan kepada para pemerintah negara untuk memberikan kebijakan yang menguntungkan mereka.

Lahirnya Pertamina mewakilkan Indonesia sebagai salah satu cara untuk merubah fenomena ketergantungan negara berkembang terhadap MNC dari negara maju. Pada tanggal 15 September 1971 disahkan dan diberlakukan Undang-undang No. 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Indonesia. Dengan Undang-undang ini Pertamina memperoleh hak kuasa pertambangan dengan batas-batas wilayah dan persyaratan yang ditetapkan oleh Presiden sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi (migas). Melalui undang-undang ini Pertamina melakukan peningkatan pengusahaan migas di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina juga melakukan pengembangan usaha, baik yang terkait dengan migas maupun yang bukan migas.⁵

Pada era 1970-an, Malaysia mulai memperhatikan kejayaan yang diraih Pertamina. Apalagi sejak terjadi krisis minyak tahun 1973 dimana terdapat larangan bagi anggota OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*) untuk mengekspor minyak. Hal tersebut ternyata menyadarkan kerajaan Malaysia akan

⁴ <http://www.wikipedia.com>

⁵ <http://www.pertamina.com/indonesia-2010-2011>

betapa pentingnya mempunyai sebuah industri strategis seperti Pertamina. Tanggal 17 Agustus 1974, didirikanlah Petronas oleh pemerintah Malaysia, yaitu singkatan dari Petroleum Nasional Berhad. Pada 1 Oktober 1974, Petronas telah diberi hak, kuasa, kebebasan, dan keistimewaan di dalam mengendalikan dan memajukan sumber Petroleum di Malaysia.⁶ Dan sejak saat itu, Petronas menjadi perusahaan migas nasional Malaysia. Berdirinya Petronas juga dimaksudkan agar Malaysia memiliki cabang produksi yang mengelola sumber daya migas dalam negeri agar pengelolaannya tidak di dominasi pihak asing. Karena dahulunya pengelolaan migas di Malaysia banyak dijalankan oleh kontraktor asing, yakni Shell dari Belanda. Berdirinya Petronas sebagai perusahaan migas nasional Malaysia tertuang dalam peraturan undang-undang Malaysia. Yakni tertuang dalam “*UNDANG-UNDANG MALAYSIA, Akta 144 AKTA KEMAJUAN PETROLIAM, 1974*”.⁷

Persaingan Pertamina dengan banyaknya perusahaan multinasional sektor migas di dalam negeri dan luar negeri tidak bisa dihindarkan. Sejak UU No. 22 tahun 2001 diberlakukan, Pertamina menjadi pemain yang harus bersaing dengan pemain lain seperti Cevron, Total, Shell Petrochina dan MNC bidang perminyakan lainnya. Begitu halnya dengan pertarungan sengit yang dilakukan Petronas dengan Shell dan Esso dalam masalah migas di Malaysia. Sebagai contoh di sektor hilir, bahan bakar yang terjual di Malaysia melalui SPBU Petronas sekitar 29,1% sedangkan Shell menguasai 32,8%. Selebihnya diraup oleh beberapa pemain lain, seperti BP dan

⁶ <http://www.wikipedia.com> diakses tanggal 5 Oktober 2007

Esso.⁸ Setidaknya saat ini Petronas juga mendominasi pasar domestik Malaysia dan telah diperhitungkan dalam sektor perminyakan internasional.

Penguasaan modal, teknologi dan pemasaran membuat para pemain besar asing (MNC) memiliki pengaruh kuat dalam bisnis perminyakan global. Tekanan dari pihak asing pun juga mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan. Kemenanan ExxonMobil sebagai general manager blok Cepu merupakan bentuk keinginan Indonesia untuk mempercepat produksi minyak yang tidak hanya bisa mengandalkan Pertamina karena terbatasnya modal dan teknologi. Berbeda dengan di Malaysia dimana Petronas mampu menunjukkan persaingan berarti dengan MNC migas di negerinya. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah Malaysia melalui kebijakan. Dengan memaksimalkan kebijakan terhadap Petronas, saat ini Petronas dapat berkembang menjadi perusahaan minyak kelas dunia (*World Class Oil Company*).

Kebijakan Indonesia melalui Pertamina dan Malaysia melalui Petronas merupakan respon pemerintah kedua negara atas tekanan dan ketergantungan terhadap perusahaan multinasional. Kebijakan terhadap Pertamina dan Petronas yang mewakili Indonesia dan Malaysia berbeda-beda sesuai dengan daya tawar-menawar pemerintah masing-masing negara. Dalam tekanan MNC migas, Indonesia dan Malaysia terus mengembangkan usaha *partnership* (kerjasama) yang berimbas pada kedua perusahaan nasional mereka. Proyek-proyek kerjasama dilakukan demi terciptanya pembangunan ekonomi kedua negara dari sektor migas.

⁸ *Esso/Exxon/ExxonMobil*. (2010). *Esso/Exxon/ExxonMobil*. (2010). *Esso/Exxon/ExxonMobil*.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian masalah diatas terdapat sebuah pertanyaan yang ingin penulis analisa dan jelaskan, Yaitu, *“Mengapa dalam menghadapi tekanan MNC, Petronas Malaysia lebih mampu untuk bekerjasama seimbang dan saling menguntungkan ketimbang Pertamina Indonesia?”*

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar teori yang digunakan untuk membantu dalam menentukan tujuan serta arah penelitian dan memilih konsep yang tepat guna untuk membentuk suatu hipotesa.

Secara lebih spesifik Mc Clain dan Segal mendefinisikan teori sebagai:

“serangkaian statemen yang saling berkaitan ...(yang terdiri dari): 1) kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu; 2) kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain; 3) kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement teoritik itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empirik (yaitu hipotesis).”⁹

Untuk pokok permasalahan yang dikemukakan, penulis menggunakan teori:

⁹ Garvin Mc Clain and Erwin Segal, *The Game of Science*, Brooks, Cole, 1973, hal. 99, dikutip dari

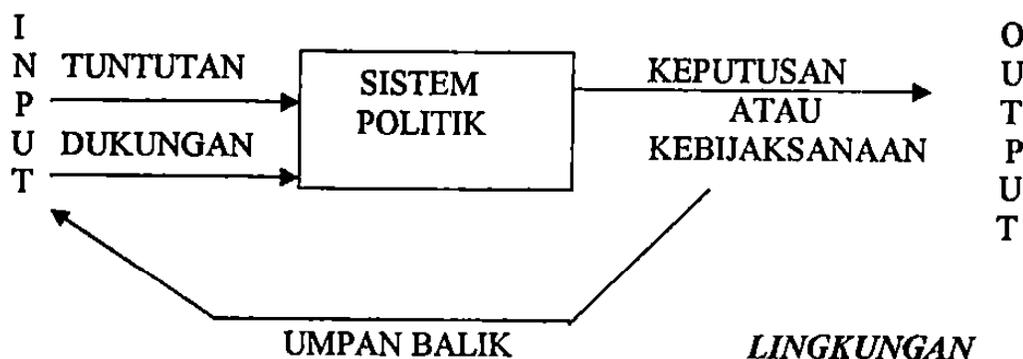
1. Teori Pembuatan Kebijakan (*The decision making theory*)

Berbagai kebijakan dan regulasi yang dibuat Pemerintah kedua negara merupakan faktor penting yang dapat menghambat ataupun mendukung perkembangan kedua perusahaan migas nasional Malaysia dan Indonesia ini.

"Decision making involve the choice of an alternative from among a series of competing alternatives." Theories of decision making are concerned with how such choices are made.¹⁰

Menurut David Easton, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dapat digambarkan seperti di bawah ini:

LINGKUNGAN



Sistem politik mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yakni keputusan-keputusan yang sifatnya otoritatif. Sistem politik secara kontinyu harus mendapatkan input untuk bekerja. Terdapat dua jenis input yang berupa dukungan, yang berasal dari lingkungan sistem politik yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua jenis input inilah merupakan bahan mentah

¹⁰ James E. Anderson, *Public Policy Making*, CBS College Publishing, N. Y., 1964

yang harus diproses di dalam sistem politik. Tanpa adanya input sistem tidak bisa bekerja.

Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil atau konsekuensi dari bekerjanya suatu sistem politik, berupa keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sifatnya otoritatif yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Apabila output tidak ada, maka kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh sistem ini.

Hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya sangat erat. Sistem politik dipengaruhi segala macam hal yang terjadi di sekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk ke dalam sistem politik. Pengaruh lingkungan, baik yang intrasocietal maupun ekstrasocietal mengalir masuk ke dalam sistem politik sebagai tuntutan-tuntutan (*demands*) maupun sebagai dukungan-dukungan (*supports*). Hasil daripada sistem politik disebut output ini mengalir ke masyarakat atau mungkin akan kembali lagi masuk dan mempengaruhi sistem politik sebagai input.¹¹ Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara sistem politik dengan lingkungannya.

2. Konsep “Multinational Corporations” (MNCs)

Munculnya aktor-aktor baru dalam politik internasional terjadi sejak tidak ada lagi persaingan ideologi antara AS (Amerika Serikat) dan USSR (Uni Soviet). Semakin besarnya keterkaitan suatu negara dengan negara lain sebagai dampak dari

¹¹ Heryanto, *Sistem Politik Suatu Negara*, Jember, M. J. P. 1997, hal. 12-13

globalisasi (misalnya globalisasi ekonomi) dan semakin pesatnya perkembangan kemajuan teknologi juga informasi merupakan beberapa hal yang memicu tumbuhnya aktor Non-State. MNCs (*Multinational Corporations*) adalah beberapa diantara aktor Non-State yang menjadi pemain penting dalam era globalisasi saat ini.

Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang memiliki markas besar atau pusat operasi perusahaan di dalam satu negara dan memiliki dan menjalankan perusahaan lain di negara-negara lainnya. perusahaan-perusahaan lainnya ini umumnya disebut cabang tambahan. Sehingga sebuah perusahaan multinasional sebenarnya menggantikan nama sebuah perusahaan yang beroperasi dalam suatu keserbaragaman lingkungan nasional.¹²

Sebuah korporasi adalah struktur bisnis yang tujuan hidup satu-satunya adalah mencari keuntungan dengan menghasilkan produk-produk dengan biaya serendah mungkin dan menjualnya dengan harga setinggi mungkin. Orang-orang yang mengelola korporasi sejagad (*global corporations*) adalah orang pertama yang memiliki organisasi, teknologi, uang dan ideologi untuk mencoba mengelola dunia sebagai satu kesatuan terpadu.¹³ Korporasi global (MNC) sedang mengubah ekonomi politik dunia melalui pengendalian yang makin meningkat terhadap tiga sumber pokok kehidupan ekonomi yaitu teknologi produksi, modal finansial, dan pemasaran. Korporasi multinasional yang melebarkan sayap ke banyak negara di dunia banyak

¹² Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations*, Macmillan Publishing Company, New York, 1988, page 75

¹³ Richard J. Barnet dan Ronald E. Muller, *Menjangkau Dunia: Menguak Kekuasaan Perusahaan*

menekan negara-negara miskin dan berkembang demi kepentingan utama mereka yakni laba yang sebesar-besarnya.

Pada tahun 1980, volume penjualan tahunan dari 10 PMN terbesar lebih besar daripada pendapatan domestik bruto (PDB) dari 87 negara (tak termasuk negara-negara Eropa Timur). Dari sini biasanya diduga bahwa PMN dapat secara siap campur tangan, secara langsung maupun tidak, terhadap kehidupan ekonomi dan politik negara inangnya, dan bahkan mencapai suatu dominasi pengaruh di negara-negara Dunia Ketiga yang lebih miskin. (De Gaulle berkali-kali mengeluhkan "tantangan Amerika" yang dihasilkan oleh PMN-PMN Amerika Serikat bahkan bagi negara-negara industri maju). Tepatnya, bagaimana kemampuan ekonomi perusahaan asing diterjemahkan ke dalam kekuatan politik domestik baik di negara industri maju maupun negara terbelakang jarang diungkapkan dengan peristilahan yang khusus, melainkan hal itu agaknya sudah menjadi anggapan bagi siapa yang menerima begitu saja bahwa politik adalah subordinasi dari ekonomi. Terang saja, perusahaan dapat melayani kepentingan politik asing dari pemerintah negara induknya. Mereka dapat melibatkan diri dalam kegiatan mata-mata bersama, mereka dapat mencampuri urusan politik domestik negara inangnya, secara legal maupun tidak (misalnya mencoba untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara dalam suatu pemilihan, atau mempengaruhi pemerintah negara induknya untuk mengubah kebijakan tertentu); dan mereka dapat menekan pemerintah negara induknya untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang sesuai legislatif diundang dan sebagainya.

negari yang akan memajukan kepentingan-kepentingan PMN, tanpa memperdulikan akibat-akibatnya bagi negara-negara inang.

Contoh-contoh dari intervensi PMN dalam politik negara bisa ditunjukkan namun jumlah kasus-kasus yang terdokumentasi tidaklah cukup banyak untuk membenarkan rincian dari sebuah teori umum yang sah secara universal. Asumsi kaum Neo-Marxis mengenai signifikansi politik jahat dari PMN diambil lebih berasal dari pengujian normatif atau ideologi a priori daripada telaah kasat (empirik yang cermat). Memang memungkinkan untuk menampilkan suatu penilaian berimbang mengenai aspek-aspek positif dan negatif dari PMN-keuntungan dan ongkos ekonominya bagi negara-negara inang.¹⁴

Dalam sektor migas, korporasi multinasional dari negara-negara maju pada umumnya juga melakukan tekanan terhadap negara-negara berkembang yang memiliki banyak sumber daya energi. Hubungan antara negara-negara dan korporasi seharusnya saling menguntungkan, namun kenyataannya banyak tekanan yang diberikan terhadap negara miskin dan berkembang sehingga daya tawar-menawar negara tersebut menjadi lemah. Kekuatan atas modal, teknologi, informasi yang dimiliki korporasi global menyebabkan negara-negara berkembang memang sering harus berada di bawah aturan permainan korporasi multinasional.

¹⁴ Diantara penilaian awal mengenai pro-kontra terhadap PMN, lihat Samuel Huntington, "Transnational Organization in World Politics," *World Politics*, 25 (April 1973), dan John Diebold, "Multinational Corporation-Why be scare of theme?" *Foreign Policy*, No. 12 (Musim Gugur 1973), dikutip dari, James E. Dougherty dan Robert L. Pfatzeraff.Jr. *Contending Theories of International*

Sejalan dengan perkembangan waktu hingga saat ini di era globalisasi, banyak negara berkembang tersadar akan perlunya memiliki dan mengolah sumber daya sendiri agar tidak bergantung sepenuhnya kepada pemodal asing. Untuk itu munculah banyaknya perusahaan nasional migas dari negara-negara berkembang, termasuk diantaranya di Indonesia yakni Pertamina dan di Malaysia yakni Petronas.

Indonesia dan Malaysia berusaha untuk meminimalkan campur tangan kontraktor asing dari masalah pengolahan sumber daya migas mereka melalui perusahaan migas nasional mereka. Walaupun hingga saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan perusahaan migas asing (*International Oil Company*) masih sangat signifikan di Indonesia dan di Malaysia. Persaingan serta tawar-menawar terus berlangsung antara korporasi dengan negara melalui banyaknya tekanan.

Indonesia dan Malaysia pada akhirnya tidak dapat menghindar dari arus pasar bebas dan globalisasi. Tekanan yang diberikan pihak asing mengharuskan kedua negara ini mengambil tindakan untuk memaksimalkan kedua perusahaan nasional mereka demi terciptanya kepentingan nasional untuk memakmurkan negara melalui pengolahan sumber daya migas yang tepat.

Perbedaan pertumbuhan Pertamina dan Petronas juga merupakan dampak dari perbedaan kebijakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Tekanan yang diberikan MNC migas terhadap masing-masing negara menimbulkan reaksi berbedabeda pula sesuai kemampuan negara melawan tekanan tersebut. Malaysia mampu

melakukan perubahan kebijakan terhadap Pertamina menyebabkan perusahaan ini mati kutu di sektor hulu dan hilir karena tidak mampu bersaing dengan para rival nya.

F. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teori di atas, penulis mengambil suatu hipotesa “Dalam menghadapi tekanan MNC, Petronas Malaysia lebih mampu untuk berkerjasama seimbang dan saling menguntungkan ketimbang Pertamina Indonesia, karena:

1. Secara Legal, regulasi migas di Malaysia lebih berpihak pada Petronas dan sebaliknya regulasi migas Indonesia cenderung memperlemah kedudukan Pertamina
2. Dalam pengelolaannya, Petronas dijauhkan dari sensitif politik sehingga dapat menjalankan perusahaan dengan profesional di banding Pertamina.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Dalam obyek penelitian, penulis mencoba membandingkan Indonesia melalui Pertamina dan Malaysia melalui Petronas. Bagaimana reaksi negara berkembang atas tekanan perusahaan multinasional migas. Bagaimana perusahaan multinasional mencoba mempengaruhi kebijakan negara agar menguntungkan mereka

Penulis juga lebih membatasi bahasan yakni kebijakan di sektor migas apa saja yang berbeda antara Malaysia dan Indonesia terhadap perusahaan migas nasional mereka.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan apabila penulis akan menjelaskan masalah di luar batasan tersebut, untuk memperkuat analisa dan dapat dijadikan data pendukung penulisan, dengan catatan diperhatikan relevansinya.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan berjalan dengan baik karena adanya faktor dan sistem metodologi yang baik. Pembahasan kajian ini menggunakan analisis data sekunder. Data-data diperoleh dari buku-buku, majalah, surat kabar, internet atau website. Dari data-data di atas kemudian penulis memilih dan memilah-milah artikel-artikel ataupun tulisan-tulisan yang relevan dan berkaitan dengan kajian penulisan skripsi ini. Di dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif meliputi suatu jangkauan pendekatan yang luas, tetapi pada pokoknya tak satupun dari pendekatan-pendekatan tersebut yang didasarkan pada pengukuran numerikal.¹⁵

¹⁵ Gary King, Robert O. Keohane, dan Sidney Verba, *Designing Social Inquiry, Scientific Inferences in Qualitative Research*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004, hal. 10.

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah eksplanasi. Eksplanasi adalah upaya menjawab pertanyaan “mengapa?”, yaitu menjawab pertanyaan “*Mengapa dalam menghadapi tekanan MNC, Petronas Malaysia lebih mampu untuk bekerjasama seimbang dan saling menguntungkan ketimbang Pertamina Indonesia?*”

Bagaimana peran perusahaan multinasional di Indonesia dan di Malaysia dan bagaimana mereka mempengaruhi proses pengambilan kebijakan sektor migas Indonesia dan Malaysia. Dimana kebijakan tersebut berdampak para perusahaan migas nasional yakni Pertamina dan Petronas.

I. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Menjelaskan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: Sejarah Migas Indonesia dan Malaysia

Menjelaskan tentang sejarah industri migas kedua negara dan latar belakang berdirinya Pertamina dan Petronas sebagai perusahaan migas nasional Indonesia dan Malaysia.

BAB III: Keberadaan dan Tekanan MNC Migas di Indonesia dan Malaysia

Menjelaskan dominasi dan tekanan kontraktor asing (MNC) di Indonesia dan Malaysia serta pengaruhnya terhadap industri

BAB VI: Perbandingan Respon Malaysia dan Indonesia Terhadap Tekanan MNC Migas

Menjelaskan perbedaan kebijakan Pemerintah Indonesia dan Malaysia atas pengaruh MNCs (kontaktor asing) yang berdampak pada perkembangan Petronas dan Pertamina dan pola kerjasama dengan perusahaan multinasional migas.

BAB V: Kesimpulan

Daftar kesimpulan dari bab-bab sebelumnya